

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI DESATAPUNG JAYA KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN  
HULU TAHUN 2021**

**Oleh : Alpin Taufia Sepnanda**  
**Pembimbing: Adlin, S.Sos., M.Si**  
Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRAK**

Pemerintah desa berperan dalam memfasilitasi masyarakat dan memberikan arahan yang baik kepada masyarakat tentang tujuan pembangunan dan pemberdayaan yang akan dilaksanakan. Masyarakat berperan dalam menyumbangkan pemikiran, tenaga, hingga harta benda untuk demi keberhasilan pemberdayaan dan pembangunan. Pemerintah desa berperan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Contoh pemberdayaannya ialah ternak kambing. Permasalahan pada penelitian ini adalah kurang maksimalnya pemerintah desa tapung jaya dalam menjalankan peran nya sebagai pemerintah desa.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah desa tapung jaya dalam mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat desa melalui ternak kambing dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan perannya sebagai pemerintah desa dengan merujuk pada teori peran pemerintah desa menurut Isbandi Rukmianto(2013) yaitu pemberdayaan masyarakat melalui Tahap Persiapan, Tahap Pengkajian, Tahap Perencanaan Alternatif, Tahap Pemfomalisasi Rencana Aksi, Tahap Pelaksanaan, Tahap Evaluasi, Tahap Terminasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data utama ialah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data ini adalah Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah belum optimalnya peran pemerintah desa tapung jaya sebagai penggerak utama dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Tapung Jaya seperti masih kurangnya dana dan prasarana lainnya seperti pelatihan keterampilan, partisipasi, ketidakjelasan pengelolaan ternak kambing dan adanya faktor penghambat dalam melaksanakan peran pemerintah di Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

***Kata kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Persiapan, Pengkajian, Pelaksanaan,dan Evaluasi.***

**ABSTRACT**

*The village government plays a role in facilitating the community and providing appropriate guidance regarding the development and empowerment objectives to be implemented. The community contributes ideas, energy, and even material resources to ensure the success of empowerment and development. The village government plays a role in implementing community empowerment activities. An example of this empowerment is goat farming. The problem in this research is the suboptimal performance of the Tapung Jaya village government in carrying out its role as a village government.*

*The purpose of this study was to determine the role of the Tapung Jaya village government in optimizing the village community empowerment program through goat farming and to identify the supporting and inhibiting factors in implementing its role as a village government. This study refers to the theory of the role of village government according to Isbandi Rukmianto (2013), namely community empowerment through the Preparation Stage, Assessment Stage, Alternative Planning Stage, Action Plan Formalization Stage, Implementation Stage, Evaluation Stage, and Termination Stage. This research is a descriptive qualitative study with primary and secondary data sources. Data collection techniques used were interviews and documentation. Data analysis techniques were Data Reduction, Data Presentation, and Conclusion Drawing. The results of this study indicate that the role of the Tapung Jaya village government as the main driver in community empowerment activities in Tapung Jaya Village is not optimal, such as the lack of funds and other infrastructure such as skills training, participation, unclear goat farming management, and the existence of inhibiting factors in implementing the government's role in Tapung Jaya Village, Tandun District, Rokan Hulu Regency.*

*Keywords: Community Empowerment, Preparation, Assessment, Implementation, and Evaluation.*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Membuat Kebijakan Tentang Desa Dalam Memberi Pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat Desa yang di tujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Konsep yang sering di munculkan dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana program- program pembangunan di rancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadikan subjek dari pembangunan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pembangunan di segala bidang kepada masyarakat secara merata. Salah satu peran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah

pemberdayaan masyarakat melalui perhatian terhadap berbagai usaha yang merupakan mata pencaharian masyarakat. Kegiatan pemberdayaan ini diharapkan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi usaha masyarakat serta sumber daya alam di lingkungan tersebut (Abdul Rajak, 2014).

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mentransformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan di dalam arena segenap aspek kehidupan. . Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan, dari sisi inilah masyarakat difasilitasi untuk mengkaji kebutuhan, masalah serta peluang pembangunan mereka sendiri. Di dalam

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa, memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Perubahan yang sederhana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa, sedangkan menurut Bintoro Tjokroaminoto (2000; 113) bahwa pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinue dari suatu keadaan tertentu kepada keadaan yang lebih baik.

Dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 12 Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Landasan tugas pemerintah desa diatur pada peraturan

permendagri Nomor 48 tahun 2015 tentang tata kerja pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 yang mempunyai tugas dan fungsi: menyelenggarakan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan seperti melaksanakan hak dan kewajiban masyarakat partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan, pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga, dan karang taruna. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian- kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan penguasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Berdasarkan hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan pemerintah desa. (Parson, et.al. 2019)

Desa Tapung Jaya merupakan salah satu desa di Kecamatan Tandun yang merupakan daerah Eks Trans UPT 1, menjadi desa defenitif pertama kali pada

tahun 1984. Kepala Desa Tapung Jaya untuk pertama kalinya tanpa dipilih oleh masyarakat, alim ulama, tokoh masyarakat atau tokoh agama melainkan pemilihannya ditunjuk secara langsung, dan ditunjuklah Bapak Nurhadi sebagai Kepala Desanya. Sebagian besar penduduk desa ini didominasi oleh suku Jawa, tidak terkecuali pula suku lainnya. Desa Tapung Jaya telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat yaitu dengan melaksanakan pembentukan program-program pemberdayaan masyarakat seperti pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, badan usaha milik desa, kelompok ternak kambing, dasa wisma, posyandu, karang taruna dan lain-lain. Program ini dilaksanakan oleh warga desa Tapung Jaya yang telah ditunjuk oleh pemerintah desa untuk mengurus pemberdayaan masyarakat tersebut. Program ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta menutupi kebutuhan pangan masyarakat desa Tapung Jaya kecamatan Tandun, Rokan Hulu. Pemberdayaan masyarakat ini juga seharusnya bisa mendukung ataupun meningkatkan perekonomian masyarakat desa Tapung Jaya.

Dalam tiga tahun terakhir pemerintah desa Tapung Jaya telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun tidak seluruhnya dapat tereliasasikan dengan baik. Bumdes desa tapung jaya atau yang disebut juga bumdes bunga sari telah terverivikasi dokumen badan hukum kemendesa yang artinya dalam penilain bumdes Bunga Sari dapat dikatakan maju ataupun berhasil. pemberdayaan masyarakat desa Tapung Jaya menganggarkan dana yang cukup besar yaitu Rp. 211.137.400,00. Untuk ketahanan pangan masyarakat desa Tapung Jaya sendiri yaitu kelompok ternak kambing mendapatkan anggaran yang paling besar yaitu Rp. 169.401.000,00. Anggaran dana untuk pemberdayaan masyarakat terbesar kedua yaitu untuk pembentukan dasa wisma sebesar Rp. 11.736.400,00. Sedangkan yang lainnya seperti Kontribusi pelatihan kader posyandu, Kontribusi pelatihan pengurus PKK, Kontribusi pelatihan guru PAUD, Pelatihan Tata kelola BUMDesa untuk Pemdes, BPD dan pengurus Bumdesa, Pelatihan pengelolaan BUMDesa untuk pengelola BUMDesa Bunga Sari masing masing mendapatkan angarn dana sebesar Rp. 6.000.000,00.

**Tabel 1. 2 Kelompok Ternak Kambing Desa Tapung Jaya 2021**

No	Nama Kelompok	Jumlah Anggota	Alamat	Jumlah Ternak kambing		Total
				Jantan	Betina	
1	Sejahtera	10	Jl. Pelita I Rt 002 Rw 001	1	12	13
2	Mekar Jaya	10	Jl. Pelita III Rt 001 Rw 002	1	12	13
3	Maju Jaya	10	Jl. Pelita V Rt 001 Rw 003	1	11	12
4	Sidumulyo	10	Jl. Pelita VII Rt 001 Rw 004	1	11	12
5	Sabilulungan	10	Jl. Pelita X Rt 002 Rw 005	1	10	11
6	Tunas Jaya	10	Jl. Pelita XII Rt 002 Rw 006	1	10	11
Jumlah				6	66	72

*Sumber* : Kantor Desa Tapung Jaya

Pemerintah desa sebagai penggerak terbesar seharusnya ikut serta dalam proses pelaksanaan kelompok ternak kambing. Pemerintah desa harus mengoptimalkan perannya sebagai fasilitas terbesar di desa untuk terus mendukung kegiatan peternakan. Kelompok ternak kambing ini merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Desa Tapung Jaya. Pemerintah Desa hendaknya lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat untuk terus berproses agar lebih baik dan mandiri dalam melaksanakan program desa tersebut. Pemerintah Desa juga seharusnya turut serta dalam kegiatan ternak kambing ini terutama berperan serta dalam perawatan kandang ternak dan memberikan fasilitas yang cukup seperti Dana untuk Bergeraknya

dan berkembangnya kelompok ternak, APBDESA memang sudah ada untuk kegiatan pemberdayaan kelompok ternak kambing ini, tetapi dana itu tidak direalisasikan sepenuhnya kepada kelompok ternak kambing, mereka tidak mendapatkan sebagaimana yang telah dicantumkan di APBDESA, bentuk dukungan dari pemerintah desa adalah bentuk dukungan yang sangat di perlukan oleh masyarakat desa. Pemerintah Desa Tapung jaya juga belum pernah memberikan pelatihan khusus untuk para kelompok ternak kambing untuk terus mengembangkan program ternak kambing ini yang diharapkan mencapai kesejahteraan masyarakat. Disisi lain pemerintah desa juga belum pernah mendata ataupun memeriksa keadaan kesehatan ternak kambing. Pemerintah desa hanya

melakukan monitoring jumlah kambing yang tersisa tanpa mengetahui keadaan ternak kambing tersebut.

Pemerintah desa masih belum optimal dalam menjalankan perannya sebagai penggerak utama dalam suatu program untuk menjadikan program ini menjadi lebih baik lagi, pemerintah desa masih belum optimal dalam memberikan dana kepada masyarakat untuk menjadikan pemberdayaan masyarakat menjadi lebih maju dan berkembang dengan baik, pemerintah desa juga belum optimal memberikan fasilitas terhadap pemberdayaan masyarakat termasuk, selain itu pemerintah desa kurang memberikan semangat kepada para kelompok ternak kambing dimana dalam anggaran yang di anggarkan pemerintah desa cukup memakan dana yang besar untuk kelompok ternak kambing yang diharapkan menjadi lebih sejahtera, karena kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang paling pokok dalam pemberdayaan Desa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021**

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahanpokok dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimana peran pemerintah desa Tapung Jaya dalam mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat desa?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam program pemberdayaan masyarakat desa Tapung Jaya kecamatan Tandun Rokan Hulu?

## 3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentulah mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan yang ingin diketahui, adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peran pemerintah desa Tapung Jaya dalam mengoptimalkanprogram pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Untuk mengetahui saja faktor pendukung dan penghambat dalam program bentuk pemberdayaan masyarakat desa.

## B. Tinjauan Teori

Menurut Isbandi Rukminto Adi (2013) di dalam (Mufidah 2018), pemberdayaan masyarakat memiliki 7 (tujuh) terhadap pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

#### a. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community woker, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.

#### b. Tahapan Pengkajian (Assessment)

Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (feel needs) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

#### c. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (exchange agent) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

#### d. Tahap Pemfomalisasi Rencanaksi

Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk

merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu juga petugas membantu untuk memfomalisasi gagasan mereka kedalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.

#### e. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.

#### f. Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan persiapan pemformulasian rencana aksi warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat

membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

g. Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

### C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini yang bersifat interpretasi (*interpretive inquiry*). Penelitian kualitatif merupakan bentuk penyelidikan yang didalamnya penelitian melakukan interpretasi terhadap apa yang dilihat, didengar dan dipahami terkait objek dan subjek yang ditelitinya. dilakukan oleh peneliti tentunya tidak bisa dipisahkan dari latar belakang peneliti, sejarah, konteks dan pemahaman yang dimiliki peneliti tersebut sebelumnya. Setelah penelitian dilakukan maka peneliti berusaha membuat interpretasi yang sesuai dengan maksud partisipan, sekaligus menawarkan interpretasi lain terkait dengan studi tersebut.

Pendekatan kualitatif merupakan metode yang muncul atas teks atau ambar, yang mana peneliti dapat memposisikan

dirinya dalam mengamati perilaku peserta dari waktu ke waktu. Peneliti dapat mengumpulkan makna dari pandangan partisipan atas pertanyaan terbuka yang berasal dari lapangan, dan peneliti berfokus pada konsep atau fenomena yang terjadi, sehingga nanti peneliti dapat memvalidasi keakuratan temuan-temuan, membuat interpretasi data, dan berkolaborasi dengan pihak-pihak (John W. Creswell, 2014).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu terdiri dari 2 cara yakni wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap tahu terkait permasalahan penelitian, dan dokumentasi digunakan sebagai memperkuat data-data penelitian yang berupa dokumen, catatan, buku, gambar, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi semua proses teknik analisis data di mana seorang peneliti melakukan telaahan awal terhadap data-data yang telah dihasilkan dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian. Sebagaimana makna asalnya, istilah reduksi atau reduction berarti pengurangan atau penentuan ulang.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tapung Jaya Kecamatan Tnadun Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021

#### a. Tahap Persiapan

Persiapan untuk pemberdayaan masyarakat sendiri biasanya pemerintah desa, BPD, dan masyarakat berkumpul untuk membahas program pemberdayaan apa saja yang akan dilakukan di desa Tapung Jaya. Pemerintah desa dan masyarakat bersepakat dengan apa saja yang akan dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat desa, baik itu untuk jangka pendek ataupun jangka panjang.

Mengenai Pemberdayaan Masyarakat Desa pemerintah desa Tapung Jaya sudah mensosialisasikan Program yang akan dilakukan oleh pihak desa dengan mengundang perwakilan masyarakat desa yang akan bergabung dalam kegiatan pemberdayaan ini. Kemudian, pihak Pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya tentang program ini dan membuka aspirasi masyarakat untuk menunjang keberlangsungan dari program ini. bagi yang mempunyai usulan bisa langsung menyampaikan usulnya melalui RT setempat, juga bisa ke BPD dan juga LPM Desa Tapung Jaya. Setelah

ditampungnya usulan tersebut, lalu usulan tersebut dibawa ke Musyawarah Dusun. Lalu dari Musyawarah tersebut usulan-usulan dari Masyarakat diprioritaskan karena yang akan menjalankan secara rutin adalah masyarakat desa itu sendiri.

#### b. Tahap Pengkajian

Tahap pengkajian ini usulan masyarakat yang telah ditampung pada tahap persiapan harus dikaji kembali, terdapat tiga pengkajian untuk menentukan kegiatan yang dilakukan, yang pertama pagu indikatif yang turun dari pemerintah, pagu indikatif ini berupa dana yang diberikan pemerintah kepada Pemerintah Desa Tapung Jaya. Yang kedua, skala prioritas kegiatan maksudnya kegiatan mana yang harus didahulukan dan kegiatan mana yang harus ditangguhkan. Dalam menentukan skala prioritas juga memungkinkan bahwa kegiatan yang belum terlaksana pada tahun sebelumnya menjadi kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan pada tahun selanjutnya. Dan yang ketiga, program jangka pendek, menengah dan panjang dari Pemerintah Desa Tapung Jaya itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa Tapung Jaya juga akan tetap melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah di programkan untuk mengembangkan kehidupan ekonomi

masyarakat desa Tapung Jaya, pemerintah desa tetap memprioritaskan segala program pemberdayaan yang ada, karena program yang ada biasanya sudah dirancang oleh pihak desa sesuai pendanaan yang ada.

#### c. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pemerintah Desa Tapung Jaya memberikan wadah masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Usulan-usulan dari masyarakat sama seperti dengan pada tahap persiapan, yaitu usulan masyarakat dari RT dan RW ataupun dari BPD. Namun keterlibatan masyarakat dalam pengusulan di Desa Tapung Jaya ini masih kurang. Terdapat beberapa hal yang melatarbelakanginya, yang pertama dikarenakan kurangnya wadah perkumpulan masyarakat, hanya beberapa RT yang memiliki perkumpulan di lingkungannya. Dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Pemdespun terkadang tidak semua warga juga ikut terlibat. Kedua, masyarakat Tapung Jaya sendiri memang kurang aktif dalam menyampaikan pendapat dan usulannya sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa menyampaikan usulannya. Usulan yang masuk dari masyarakat hanya meliputi usulan pembangunan infrastruktur secara umum. Kurangnya usulan yang mengarah

terhadap pemberdayaan masyarakat dengan tujuan memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki, sehingga terkadang membuat pihak pemerintah desa bingung untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Tapung Jaya baik ibu – ibu atau bapak – bapak, tetapi terkadang masih ada saja keluhan yang tidak tersampaikan oleh masyarakat yang pemerintah desa belum tau apa penyebabnya. Kemudian terkadang masyarakat ini masih banyak yang enggan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang ada di desa mereka sendiri, mungkin saja terdapat berbagai alasan yang ada contohnya saja karna pekerjaan utama mereka yang mungkin tidak dapat pemerintah desa mengikut campurkan.

#### d. Tahap Pemformulasi Rencana Aksi

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Tapung Jaya tidak jauh fatal dengan adanya pemberdayaan ini, masalah – masalah yang ada biasanya dari masalah pendanaan yang kurang, partisipasi yang kurang atau misalnya dalam ternak kambing ada kambing yang mati, untuk sampai membuat laporan atau membuat

proposal permasalahan sejauh ini belum ada, jadi pemerintah desa Tapung Jaya tetap dapat mengatasinya.

kegiatan ternak kambing dilakukan dan dikembangkan oleh kelompok masing – masing, biasanya permasalahannya jika ada kambing yang sakit, atau pembagian tugas siapa yang mencari pakan kambing dan membersihkan kandang kambing supaya kambing tidak terus – terusan sakit, biasanya di bagi – bagi sesuai dengan waktu setiap kelompok mana yang bisa di hari tersebut, jika kambingnya sakit biasanya di pantau sejauh mana tingkat bahayanya dan jika sudah melampaui batas kemampuan kelompok biasanya akan memberitahukan kepada pihak pemerintah desa Tapung Jaya untuk pihak kesehatan dapat mengecek kondisi ternak kambing.

#### e. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan ini biasanya mengacu pada kesepakatan dalam pelaksanaan program pada saat sosialisasi dahulu. Adapun kesepakatan yang berkaitan dengan pelaksanaan antara lain terkait jam kerja, hari kerja dan tugas yang harus dikerjakan di lapangan. Menerapkan rencana kegiatan kelompok. Rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang

kongkrit dengan tetap memperhatikan realisasi rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini adalah, pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan.

Pada tahap ini pelaksanaan kegiatan sudah berjalan dan sudah beberapa kali di dalam ternak kambing juga sudah terlaksana, kandang – kandang sudah selesai untuk tempat pengembangbiakan kambing, jika ada kegagalan nantinya akan ada usulan dan saran akan kegiatan apa yang harus dilaksanakan kedepannya, untuk pelatihan khusus baik untuk kegiatan ternak kambing juga hanya memberdayakan masyarakat yang mengerti mengenai ternak saja. Anggota di setiap kelompok hanya mengandalkan kemampuan pengalaman mereka saja. Pemerintah desa juga tidak selalu melihat kondisi ternak kambing di setiap kelompok. Pemeriksaan kesehatan juga jarang dilakukan oleh pemerintah desa. Anggota kelompok ternak kambing bergantian untuk menjaga ataupun mencari rumput untuk makan ternak kambing.

pemerintah desa Tapung Jaya memberikan dana dan bibit kepada kelompok Ternak kambing, pemerintah desa Tapung Jaya tidak ada memberikan fasilitas lainnya seperti pelatihan atau peningkatan

keterampilan masyarakat desa. Kegiatan yang dilakukan ini hanya bergantung kepada keterampilan dan pengalaman yang dimiliki setiap anggota kelompoknya

#### f. Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan pemerintah Desa Tapung Jaya terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga pada tahap ini diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal. Sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan dapat membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Tidak jarang juga dari hasil pemantauan dan evaluasi ternyata yang dicapai tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bila hal ini terjadi maka evaluasi proses diharapkan akan dapat memberikan umpan baik yang berguna bagi perbaikan suatu program ataupun kegiatan. Sehingga apabila diperlukan dapat dilakukan kembali assessment terhadap permasalahan yang dirasakan masyarakat. Karena pelaku perubahan juga menyadari bahwa tolak ukur suatu masyarakat juga dapat berkembang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan yang sudah terjadi.

Evaluasi yang dilakukan pemerintah desa Tapung Jaya biasanya dilakukan satu bulan atau dua bulan sekali dengan berkumpulnya kelompok ternak kambing dan Pemerintah Desa ikut dalam proses evaluasi. Pemerintah desa biasanya melakukan evaluasi dari kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik dari segi perkembangan atau kemunduran pemberdayaan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sebenarnya kegiatan ini berkembang dan apakah efektif untuk terus dilaksanakan dalam jangka panjang.

Selain pengawasan dan pengevaluasian, disini juga terdapat pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Pemerintah desa. Bentuk pertanggung jawabannya adalah dengan Laporan Pertanggung jawaban yang berupa foto-foto kegiatan yang dilakukan oleh pihak desa maupun kelompok pemberdayaan. Selain melalui hal tersebut pemerintah desa juga melakukan pertanggungjawaban dengan memaparkan kegiatan-kegiatan yang terlaksana dengan mengundang berbagai elemen masyarakat contohnya saja pemerintah desa memberikan bentuk papan informasi mengenai kegiatan yang terlaksana. Papan informasi tersebut berisi tentang kegiatan tersebut seperti dana, sifat pekerjaan dan waktu pengerjaan,

#### g. Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti. Pada tahap ini tidak jarang dilakukan bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi lebih karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan. Tahap ini merupakan tahap akhir dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dimana terjadi pemutusan hubungankerja secara formal dengan kelompok sasaran. Program ini tidak ada keterikatan kontrak antara pekerja dan pihak Pemdes. Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati pada saat proses sosialisasi.

Pemberhentian kontrak anantara pihak desa Tapung Jaya dan masyarakat sebenarnya tidak ada, hanya saja setelah pemerintah desa memberikan dana dan fasilitasnya biasanya desa akan memberikan seluruhnya tanggung jawab kepada masyarakat pemberdayaan.

## **2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam**

### a. Kerja Sama

Pemerintah desa tapung jaya mendapatkan kerja sama dengan PT.RSI mereka memberikan bantuan alat-alat untuk pembuatan maupun perawatan kandang kambing. Namun PT.RSI juga memiliki kelompok ternak dilingkungan sekitarnya, tentu saja PT.RSI mementingkan kelompok ternak di lingkuna sekitarnya.

### b. Anggaran

Pemerintah desa Tapung Jaya memberikan anggaran kepada kelompok ternak kambing sebesar Rp.169.401.000 yang kemudian dana tersebut dipergunakan untuk membuat kandang kambing disetiap kelompok dan membeli kambing pertama untuk kemudian dikembangkan oleh setiap kelompok ternak kambing.

### c. Partisipasi Masyarakat

partisipasi dari masyarakat sejauh ini hanya ada beberapa kendala misalnya saja terkadang mereka sulit untuk membagi waktunya dengan pekerjaan utamanya terutama anggota kelompok ternak kambing yang memiliki kewajiban pekerjaan dan banyak hal keperluan yang harus mereka selesaikan. Banyak masyarakat yang enggan untuk ikut serta dalam kegiatan ini dengan berbagai alasan, adanya kerja atau memiliki kewajiban lain – lain, kemudian partisipasi dari pihak pemerintah dan PT.RSI hanya sesekali saja misalnya dalam kegiatan

pemotongan saja selebihnya tidak ada, kemudian mengenai partisipasi dalam dana tentu saja masih sangat enggan untuk masyarakat mengeluarkan biayanya sendiri untuk kegiatan ini karna banyak yang menganggap kegiatan ini tidak terlalu penting.

#### d. Ketersediaan Fasilitas

Pemerintah desa Tapung Jaya sudah memfasilitasi kelompok ternak kambing dengan memberikan 10-13 kambing, namun nampaknya hal ini tidak sebanding dengan modal awal sebesar perkembangan yang ada, karena banyak kambing – kambing yang berkembangbiak tidak signifikan, seperti fasilitas yang diberikan kepada warga sudah bisa mengembangkan program yang ada.

#### E. KESIMPULAN

Dalam mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat desa dapat melalui beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pengkajian, Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan, Tahap Pemfomalisasi Rencanaksi, Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan, tahapan evaluasi , tahaapan terminasi. Berdasarkan tahap persiapan penulis menyimpulkan bahwasannya pemerintah desa telah mempersiapkan kelompok yang akan menjalankan ternak

kambing dan kandang untuk kambing di kembang biakkan. Berdasarkan tahap pengkajian penulis menyimpulkan Pemerintah Desa selalu menerima usulan saran ataupun keluhan mengenai program pemberdayaan masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah Desa Tapung Jaya dan akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan dapat disimpulkan bahwasannya memang dari masyarakat memiliki berbagai alasan untuk mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di desa Tapung Jaya . Berdasarkan Tahap Pemfomalisasi Rencanaksi dapat disimpulkan bahwasannya ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dari partisipasi dan tingkat pendanaan, hendaknya pemerintah desa Tapung Jaya lebih memperhatikan lagi program yang ada di desanya. Berdasarkan Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan bahwasannya Pemerintah Desa memberikan dana kepada kelompok ternak kambing, dan Pemerintah Desa tidak ada memberikan fasilitas lainnya seperti pelatihan atau peningkatan keterampilan masyarakat desa. Kegiatan yang dilakukan ini hanya bergantung kepada keterampilan yang dimiliki setiap kelompoknya.

Berdasarkan tahap evaluasi bahwasannya bentuk pertanggung jawabannya adalah dengan Laporan Pertanggung jawaban yang berupa foto-foto kegiatan yang dilakukan oleh pihak desa maupun kelompok pemberdayaan. Selain melalui hal tersebut pemerintah desa juga melakukan pertanggungjawaban dengan memaparkan kegiatan-kegiatan yang terlaksana dengan mengundang berbagai elemen masyarakat contohnya saja pemerintah desa memberikan bentuk papan informasi mengenai kegiatan yang terlaksana. Papan informasi tersebut berisi tentang kegiatan tersebut seperti dana, sifat pekerjaan dan waktu pengerjaan. Berdasarkan tahap terminasi bahwasannya Pemberhentian kontrak antara pihak desa dan masyarakat sebenarnya tidak ada, hanya saja setelah pemerintah desa memberikan dana dan fasilitasnya biasanya desa akan memberikan seluruhnya tanggung jawab kepada masyarakat pemberdayaan.

Dalam program pemberdayaan masyarakat desa adapun faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung pertama yaitu kerja sama, kerja sama yang dimaksud adalah kerja sama antara pemerintah desa dengan pihak swasta untuk memberikan kemudahan dalam bentuk perizinan dan memberikan dorongan untuk melakukan program pemberdayaan

masyarakat dan berdasarkan hasil wawancara bahwasannya memang ada mengadakan kerja sama dengan pihak lain yaitu PT. RSI yang keberadaannya dengan wilayah mereka dan untuk kerja sama dengan pihak lainnya saat ini masih belum ada. Adapun faktor pendukung kedua yaitu Anggaran (Dana) merupakan salah satu faktor pendukung untuk menyukseskan kelancaran pemberdayaan masyarakat dan berdasarkan wawancara bahwasannya pemerintah desa telah memberikan anggaran ABPDesa kepada kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu kelompok ternak kambing. Adapun faktor penghambat dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat desa yaitu partisipasi masyarakat dan ketersediaan fasilitas. Adapun partisipasi masyarakat yang dimaksud yaitu berdasarkan wawancara dapat kita ketahui bahwa partisipasi memang sulit untuk dilakukan karena berbagai macam alasan yang menghambatnya. Apalagi banyak masyarakat dan pemerintah desa yang memiliki kegiatan lainnya dan sulit untuk membagi waktu. Adapun faktor penghambat lainnya yaitu ketersediaan fasilitas Berdasarkan wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa fasilitas dalam bentuk pelatihan ataupun pemeriksaan terhadap ternak kambing itu tidak dilakukan dengan

baik oleh pemerintah desa. Kelompok ternak kambing hanya mengandalkan keterampilan dan pengalaman saja untuk mengurus ternak kambing.

#### F. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka peneliti mengemukakan saran-saran antara lain:

1. Peran positif pemerintah Desa yang telah diberikan untuk pemberdayaan masyarakat dipertahankan dan terus dikembangkan agar tidak hanya berpartisipasi ditingkat daerah namun diupayakan dikenal sampai ke tingkat nasional.

2. Pemerintah desa untuk lebih aktif lagi berpartisipasi dalam mengevaluasi atau mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa sehingga program kegiatan yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik serta Pemerintah desa hendaknya lebih meningkatkan fasilitas desanya dalam semua kegiatan yang sudah di program oleh staf dan organisasi desa Tapung Jaya.

#### DAFTAR PUSTAKA

Emzir, M. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Depok, PT Raja Grafindo Persada.

Eny Yuniriyanti, R. S. (2017). Model Pemberdayaan Wanita Dalam Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Melalui Kelompok Dasa Wisma Pkk. November, 978–602.

Kharis, A., & Mutrofin, M. (2019).

Pemberdayaan Kelompok Ternak Kambing “Satwa Makmur” Melalui Program CSR PT. PLN (Persero) di Desa Tubanan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 3(1).

Lailiyah, I. S., Kusbandrijo, B., & Murti, I. (2020). Evaluasi Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Di Desa Kemantren (Studi Pada Kawasan Wisata Di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. <http://repository.untag-sby.ac.id/6831>

Kelompok, P., Wisma, D., Sempit, L., Keguruan, F., Ilmu, F., Politik, I., & Ekonomi, F. (2022). Volume 4 Nomor 2 ( 2022 ) ISSN Online : 2716-4225.4,260–265.

Mufidah, A. D., & Adi, I. R. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pt Nestle Indonesia Melalui Kelompok Tani Ternak Sapi Perah Budi Luhur. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 19(2), 20-31.

Muhammad Aris, A. (2014). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat.

Lincoln Arsyad, 3(2), 1–46.

Munggu, S., Tampan, K., & Pekanbaru, K. (2021). , 2 Rosmita. 3(1), 17–26. Nasyah, E.

Z. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Sektor Wisata. *Publiciana*, 15(01), 19–27.

Nugraha, M. W. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Ternak Sapi “Lembu Aji” Di Dusun Pondok Kulon Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 1(1), 97–106.

Palupi, S., Ulfiah, U., Prasetyohadi, Sukapti, Y. S., & Fauzi, S. Al. (2016). Buku Panduan Pelaksanaan Undang-undang Desa Berbasis Hak. In *Lakpesdam PBNU*.

Punusingon, D., M., Sambiran, S., & Kairupan, J. (2018). Peran Lurah Dalam

Mengoptimalkan Kegiatan Pkk Di Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1).

Suganda, Dadang, NFN Wagianti, Sugeng Riyanto, and Nani Darmayanti. 2019. "Kosakata Etnomedisin Dalam Pengobatan Tradisional Sunda: Kajian Linguistik Antropologi (Ethnomedicine Lexicon in Sundanese Traditional Treatment: An Antropolinguistics Study)." *Metalingua: Jurnal Penelitian Bahasa* 16(2): 153.

Sugiri, L. (2015). peranan pemerintah

daerah dalam pemberdayaan masyarakat. 56–6

Wowor, S. (2015). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian Di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. 2015(Lmd), 1–20.

Zuhaqiqi. (1386). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat (Study Kasus Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara) The. 1–73.